

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhirnya, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam teori pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dipandang sebagai indikator utama keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya fisik berupa infrastruktur. Todaro dan Smith menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar peningkatan pendapatan nasional, melainkan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, serta lembaga nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan memberantas kemiskinan. Pandangan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak otomatis menjamin terciptanya kesejahteraan apabila tidak didukung oleh pemerataan distribusi hasil pembangunan serta penguatan infrastruktur dasar yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat Abdullah (2014).

Salah satu infrastruktur dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah infrastruktur jalan. Secara teoritis, jalan merupakan prasarana transportasi yang berfungsi sebagai urat nadi distribusi barang, jasa, dan mobilitas manusia antarwilayah. Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, memperluas akses pasar, mempercepat waktu tempuh, serta mendorong investasi dan produktivitas ekonomi local. Ketersediaan infrastruktur jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat, karena jalan menjadi

prasyarat dasar bagi berjalannya seluruh aktivitas perekonomian, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, hingga jasa. Penelitian pada lingkup yang lebih mikro juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal mobilitas sosial dan ekonomi, karena akses jalan yang lebih baik memfasilitasi proses distribusi barang dan jasa serta mempercepat waktu tempuh antardaerah. Dengan demikian, secara teoritis terdapat hubungan kausal yang jelas antara kualitas infrastruktur jalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah (Yusuf et. al, 2025)

Namun demikian, antara konsep ideal mengenai peran infrastruktur jalan tersebut dengan kondisi riil di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup nyata, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, tercatat bahwa di Jawa Barat terdapat sekitar 17 juta kendaraan yang melintasi 2.362 kilometer jalan provinsi setiap harinya, sementara hampir 94 kilometer dari total panjang jalan tersebut berada dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini menggambarkan tekanan beban lalu lintas yang sangat tinggi terhadap infrastruktur jalan yang sebagian kondisinya belum sepenuhnya mantap, sehingga berpotensi menghambat efisiensi distribusi barang dan jasa serta mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat melalui Program Inpres Jalan Daerah pada tahun anggaran 2025 telah berupaya menangani sejumlah ruas jalan daerah yang rusak di Kabupaten Cirebon, Garut, Kuningan, Bogor, dan Tasikmalaya guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta penguatan aktivitas ekonomi local, namun upaya tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemantapan jalan di

Jawa Barat masih menjadi isu aktual yang memerlukan perhatian serius hingga periode penelitian ini (BPS Bandung, 2025)

Di sisi lain, dari aspek pertumbuhan ekonomi, Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja perekonomian yang relatif positif sepanjang periode 2020-2025. Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan pencapaian tahun 2023 yang sebesar 5,00 persen, sementara pada triwulan IV tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,85 persen secara tahunan. Meskipun tren pertumbuhan ekonomi tersebut secara umum menunjukkan arah yang positif, capaian tersebut pada beberapa periode masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi sorotan penting adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta berbanding lurus dengan distribusi kesejahteraan yang merata di antara seluruh kelompok masyarakat. Pada periode September 2024, rasio ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) Jawa Barat justru mengalami peningkatan menjadi 0,428 dari 0,421 pada Maret 2024, yang mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Fenomena ini memperlihatkan adanya gap antara teori pertumbuhan ekonomi yang seharusnya berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan secara merata, dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan masih terjadinya ketimpangan distribusi kesejahteraan, sebagaimana juga diperkuat oleh temuan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat apabila tidak disertai oleh pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang optimal (Saputra et. al, 2023).

Dari sisi kesejahteraan masyarakat secara langsung, data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2025 tercatat sebanyak 3,65 juta orang atau setara 7,02 persen dari total penduduk, mengalami penurunan dibandingkan periode September 2024 yang sebesar 7,08 persen. Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi makro yang relatif membaik, namun pada saat yang sama indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada periode Maret 2025 justru mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang secara nominal, kualitas kesejahteraan kelompok penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan justru semakin tertekan. Kondisi ini menjadi fenomena empiris yang relevan untuk diteliti lebih lanjut, mengingat keberadaan kesenjangan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dalam mencapai tujuan akhirnya, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 1.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025 (dalam kilometer).



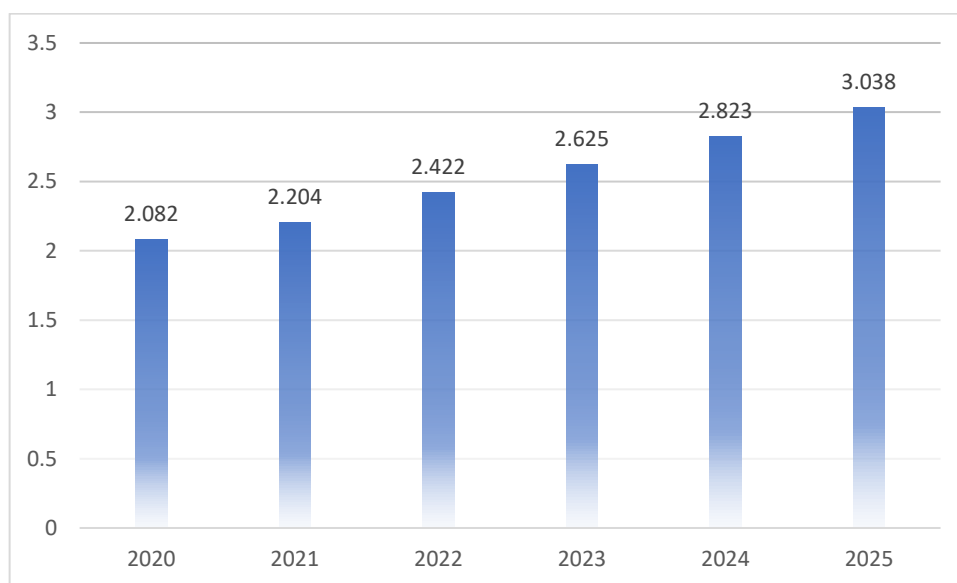
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, diolah (2025)

Berdasarkan grafik yang telah disajikan, panjang jalan di Wilayah Jawa Barat untuk periode 2020 hingga 2025 menunjukkan situasi yang cukup konstan dengan sedikit penambahan di beberapa tahun tertentu. Dari tahun 2020 hingga 2022, panjang jalan tercatat masih pada angka yang sama yaitu 2.361 km, yang mengindikasikan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan pada infrastruktur jalan dalam rentang waktu tersebut. Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan yang mencapai 2.362 km, dan kemudian kembali bertambah pada tahun 2024 menjadi 2.364 km. Namun, pada tahun 2025, panjang jalan mengalami penurunan sedikit ke angka 2.362 km. Secara keseluruhan, perubahan yang terjadi terlihat kecil dan tidak terlalu berfluktuasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan atau penambahan panjang jalan di Wilayah Jawa Barat berlangsung secara bertahap dan cenderung lambat. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 mungkin mencerminkan adanya proyek pembangunan atau renovasi jalan baru, meskipun skala proyek tersebut tidaklah besar. Di sisi lain, penurunan kecil yang terjadi pada tahun 2025 dapat disebabkan oleh perubahan klasifikasi jalan, kerusakan yang tidak lagi diakui, atau penyesuaian dalam pencatatan administratif. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga mencakup pemeliharaan serta pencatatan data yang bersifat dinamis (Luthfil et. al, 2021)

Secara umum, panjang jalan berdasarkan jenis permukaan merujuk pada total panjang jalan yang dikelompokkan sesuai dengan kondisi atau bahan permukaannya, seperti jalan yang diaspal, jalan berbatu, dan jalan tanah. Informasi ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran tentang keadaan infrastruktur jalan di suatu lokasi, di mana umumnya jalan yang diaspal memiliki kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan jenis jalan yang tidak diaspal.

Oleh karena itu, analisis panjang jalan harus memperhitungkan tidak hanya jumlahnya, tetapi juga keadaan permukaan jalan tersebut. Secara keseluruhan, informasi mengenai panjang jalan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa infrastruktur jalan tetap stabil selama periode pengamatan, dengan peningkatan yang tidak terlalu mencolok. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa pembangunan infrastruktur jalan lebih bertumpu pada peningkatan kualitas atau pemeliharaan jaringan jalan yang sudah ada, ketimbang melakukan ekspansi yang besar. Meskipun begitu, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai tetap memainkan peran krusial dalam mendukung kegiatan ekonomi, pergerakan masyarakat, serta distribusi barang dan layanan di wilayah Jawa Barat (Luthfil et. al, 2021)

Gambar 1.2 PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (Miliar Rupiah)



Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, diolah (2025)

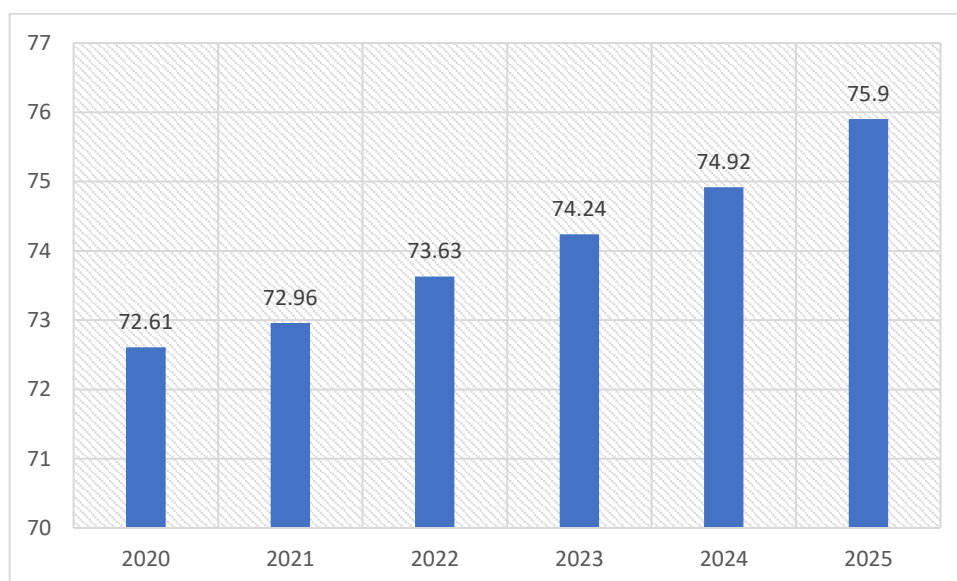
Berdasarkan data yang disajikan dalam grafik, nilai Produk Domestik Daerah Bruto Triwulanan (PDRB) berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) yang ditentukan oleh pengeluaran di Provinsi Jawa Barat sepanjang periode 2020-2025 menunjukkan lintasan naik yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020,

nilai PDRB yang tercatat sebesar 2,082 miliar rupiah, yang kemudian meningkat menjadi 2,204 miliar rupiah pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2022, nilai mengalami kenaikan lagi, mencapai 2,422 miliar rupiah, dan terus naik menjadi 2,625 miliar rupiah pada tahun 2023. Tren yang menguntungkan ini bertahan pada tahun 2024, berpuncak pada nilai 2,823 miliar rupiah, akhirnya mencapai 3,038 miliar rupiah pada tahun 2025, mewakili nilai puncak selama periode pengamatan. Pertumbuhan bertahap ini menandakan perkembangan yang relatif stabil dalam kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan ini dapat menjadi indikasi peningkatan konsumsi publik, peningkatan kinerja dalam sektor bisnis, di samping meningkatnya pengaruh pemerintah dan investasi dalam mendorong ekonomi regional. Selain itu, tren ini juga menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki tingkat ketahanan ekonomi yang terpuji dalam menavigasi fluktuasi ekonomi sepanjang periode, terutama selama fase pemulihan setelah perlambatan ekonomi (Fitriani & Hukmi, 2025)

Menurut definisi, Produk Domestik Regional Bruto pada harga saat Ini (GRDP-CP) Adalah nilai moneter agregat barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah tertentu selama jangka waktu yang ditentukan, dihitung menggunakan harga yang berlaku selama periode tersebut. Dalam konteks pendekatan pengeluaran, GRDP-CP digambarkan berdasarkan beberapa komponen utama, yang meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), dan ekspor bersih (perbedaan antara ekspor dan impor). Karena menggunakan harga yang berlaku, nilai GRDP-CP merangkum kondisi ekonomi nominal, dipengaruhi oleh fluktuasi volume produksi serta variasi tingkat harga, yang biasa disebut sebagai inflasi. Akibatnya, peningkatan nilai GRDP-CP yang diamati di Provinsi Jawa Barat sepanjang periode 2020 hingga 2025 tidak hanya

menandakan ekspansi ekonomi tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, terlepas dari tren positif yang ditunjukkan, tetap penting untuk melakukan analisis lebih lanjut menggunakan Produk Domestik Regional Bruto dengan Harga Konstan (GRDP-CP) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi secara riil. Namun, secara umum, data tersebut memberikan ilustrasi bahwa ekonomi Jawa Barat terus berkembang dan menunjukkan lintasan yang menguntungkan selama jangka waktu yang ditentukan.

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025



Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, diolah (2025)

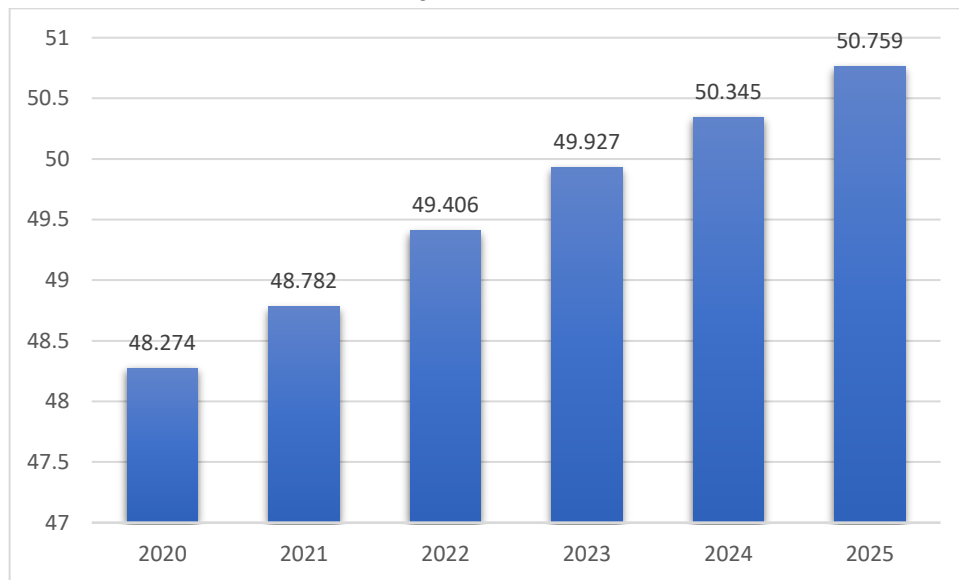
Berdasarkan ilustrasi yang ada, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan peningkatan yang terus menerus setiap tahunnya. Di tahun 2020, IPM tercatat pada angka 72,61, lalu mengalami kenaikan menjadi 72,96 pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut dengan nilai 73,63 di tahun 2022, dan kembali naik menjadi 74,24 di tahun 2023. Pada tahun 2024, IPM mencapai 74,92, hingga akhirnya mencatat

angka 75,9 di tahun 2025. Peningkatan yang bertahap ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan. Kenaikan nilai IPM ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Jawa Barat mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam faktor-faktor utama yang menyusunnya. Kenaikan ini sering kali dipengaruhi oleh semakin baiknya akses serta mutu pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan perbaikan standar hidup yang dapat terlihat dari kemampuan beli masyarakat. Dengan adanya tren pertumbuhan yang terus menerus, hal ini mengisyaratkan bahwa berbagai program pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, berlangsung efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azfirmawarman, 2023)

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat ukur gabungan yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. IPM dibentuk berdasarkan tiga dimensi inti, yaitu umur panjang dan kesehatan (yang diukur melalui angka harapan hidup), pendidikan (diukur dengan rata-rata lama pendidikan dan harapan lama pendidikan), serta standar hidup yang layak (diukur melalui pengeluaran per kapita atau daya beli masyarakat). Dengan demikian, IPM tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas sosial masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pola peningkatan IPM di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020-2025 memperlihatkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan (Ramadhan & Aceng Komarudin Mutaqin, 2025). Namun, peningkatan ini tetap harus sejalan dengan pemerataan pembangunan di setiap wilayah guna menghindari kesenjangan. Oleh karena itu, IPM bisa dijadikan sebagai indikator penting bagi pemerintah dalam merancang

kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di seluruh kawasan Jawa Barat (Hidayati et. al, 2022).

Gambar 1.4 Kepadatan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, diolah (2026)

Berdasarkan grafik yang disajikan, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan pola peningkatan yang terus menerus setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penduduk tercatat sebanyak 48,274 juta jiwa, dan kemudian melonjak menjadi 48,782 juta jiwa di tahun 2021. Lalu, pada tahun 2022, jumlah penduduk kembali naik menjadi 49,406 juta jiwa, dan terus berkembang menjadi 49,927 juta jiwa pada tahun 2023. Pola ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan total 50,345 juta jiwa, hingga mencapai angka 50,759 juta jiwa pada tahun 2025. Kenaikan yang konsisten ini mengindikasikan adanya pertumbuhan populasi yang cukup signifikan di Jawa Barat. Peningkatan jumlah penduduk ini mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tingkat kelahiran yang masih cukup tinggi, penurunan angka kematian, serta adanya migrasi ke provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki pusat

industri dan ekonomi yang pesat, Jawa Barat menjadi tujuan bagi penduduk dari daerah lain yang mencari pekerjaan dan berusaha meningkatkan kualitas hidup (Supyana & Yayat Karyana, 2022). Hal ini juga berkontribusi pada pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Definisi dari jumlah penduduk merujuk pada total individu yang tinggal dan menetap di suatu wilayah dalam rentang waktu yang ditentukan. Dalam konteks kabupaten atau kota, informasi ini umumnya mencerminkan sebaran penduduk di masing-masing daerah administratif, yang kemudian dijumlahkan menjadi total untuk provinsi. Data mengenai jumlah penduduk memiliki peranan penting dalam merencanakan pembangunan karena langsung berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penyediaan peluang kerja. Secara keseluruhan, pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat membawa dampak ganda, yaitu sebagai potensi sekaligus tantangan. Di satu sisi, populasi yang besar dapat menjadi aset bagi pembangunan melalui adanya tenaga kerja dan pasar yang luas (Anggi Niada et. al, 2026). Namun di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, infrastruktur, dan layanan publik yang memadai, pertumbuhan populasi dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mengelola pertumbuhan penduduk sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin tidak bisa terselesaikan apabila dikaitkan dengan kondisi demografis Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Jawa Barat pada semester I tahun 2024 tercatat mencapai 50.489.208

jiwa, dan terus meningkat hingga diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mencapai 50,76 juta jiwa pada tahun 2025. Besarnya jumlah penduduk ini secara teoritis dapat berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi karena menjadi pasar potensial dan sumber permintaan beragam barang dan jasa yang mendorong perusahaan untuk mewujudkan skala ekonomi yang menguntungkan, namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar juga dapat memperberat beban infrastruktur yang tersedia serta memperlemah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan per kapita secara proporsional, sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita sekaligus berdampak terhadap peningkatan kemiskinan. Dengan karakter ganda tersebut, jumlah penduduk berpotensi memperkuat atau memperlemah pengaruh infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga relevan untuk diposisikan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini (Putra, 2024)

Posisi jumlah penduduk sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara variabel ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat sebenarnya bukan merupakan konsep yang asing dalam kajian ekonomi pembangunan. Penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap kesejahteraan, yang menunjukkan bahwa kerangka analisis dengan jumlah penduduk sebagai salah satu variabel penjelas dalam model kesejahteraan telah memiliki pijakan empiris, meskipun variabel moderasi yang digunakan berbeda konteks. Sementara itu, penelitian sebagai variabel moderasi yang ber hubungan antara produk domestik regional bruto, pendidikan, dan

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, dapat memperkuat indikasi bahwa pendekatan moderasi dalam kajian kesejahteraan masyarakat masih relevan dan terus berkembang. Akan tetapi, sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menggabungkan infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan sebagai variabel independen terhadap kesejahteraan masyarakat dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi, khususnya dengan lokus Provinsi Jawa Barat pada rentang waktu 2020-2025. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian (research gap) yang menjadi salah satu landasan keterbaruan (novelty) dari penelitian ini.

Selain gap penelitian dari aspek model analisis, terdapat juga hasil temuan empiris (gap teoritis) pada penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat, mengingat fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu konsisten dengan perbaikan indikator kesejahteraan seperti inflasi, pendidikan, kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Sebaliknya, penelitian di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung, namun berpengaruh secara tidak langsung melalui disparitas pendapatan antardaerah. Adanya perbedaan arah dan signifikansi hubungan antarvariabel pada konteks wilayah yang berbeda ini menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bukanlah hubungan yang bersifat universal dan linear, melainkan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, termasuk di antaranya struktur dan jumlah penduduk yang dimiliki suatu daerah. Kondisi inkonsistensi temuan empiris tersebut memperkuat

urgensi dilakukannya penelitian lanjutan yang menguji kembali hubungan antarvariabel tersebut pada konteks Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan jumlah penduduk sebagai faktor pemoderasi. (Rahmawati et. al, 2020).

Berdasarkan uraian fenomena teoritis dan fakta empiris di atas, dapat diidentifikasi setidaknya tiga aspek kesenjangan yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan. Pertama, kesenjangan praksis pada aspek infrastruktur jalan, yaitu antara peran ideal jalan sebagai penggerak utama distribusi ekonomi dan mobilitas masyarakat dengan kenyataan bahwa sebagian ruas jalan di Jawa Barat masih berada dalam kondisi rusak berat di tengah beban volume kendaraan yang sangat tinggi. Kedua, kesenjangan praksis pada aspek pertumbuhan ekonomi, yaitu antara asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif akan otomatis meningkatkan kesejahteraan secara merata, dengan fakta empiris berupa peningkatan ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung. Ketiga, kesenjangan teoritis terkait peran jumlah penduduk, di mana di satu sisi penduduk yang besar berpotensi menjadi modal pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain dapat pula menjadi beban yang memperlemah dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan apabila tidak dikelola secara optimal. Ketiga kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara infrastruktur jalan, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat merupakan permasalahan akademik yang rumit, sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif melalui pendekatan kuantitatif.

Secara konseptual, penelitian ini mengkaji hubungan antara empat variabel utama, yaitu infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel

independen, kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen, serta jumlah penduduk sebagai variabel moderasi yang diduga memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen tersebut. Infrastruktur jalan diduga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses distribusi barang dan jasa serta penurunan biaya logistic. Pertumbuhan ekonomi diduga juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun arah dan kekuatan pengaruhnya masih menunjukkan hasil yang beragam pada penelitian-penelitian sebelumnya (Django et. al, 2020). Sementara itu, jumlah penduduk diposisikan sebagai variabel moderasi karena diduga dapat memengaruhi kekuatan hubungan antara infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, mengingat besarnya jumlah penduduk akan menentukan seberapa besar tekanan permintaan terhadap infrastruktur yang tersedia maupun seberapa optimal hasil pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara proporsional oleh masyarakat. Kerangka hubungan antar variabel inilah yang menjadi dasar pembentukan model penelitian kuantitatif dalam kajian ini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dari sudut pandang akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya dalam mengisi kekosongan kajian (research gap) mengenai model hubungan infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi, yang sejauh ini belum banyak dikaji secara simultan dalam konteks Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2025. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah

daerah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan strategi pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan mempertimbangkan faktor kependudukan sebagai salah satu determinan penting dalam efektivitas kebijakan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Isu utama yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan kesenjangan yang terus-menerus dalam kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, terlepas dari kemajuan infrastruktur jalan dan ekspansi ekonomi. Manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut belum dialami secara seragam di semua kabupaten dan kotamadya, karena fenomena ini secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan kepadatan penduduk, distribusi sumber daya pembangunan yang merata, ketersediaan peluang kerja, dan distribusi pendapatan. Selain itu, populasi besar dapat bertindak sebagai penentu yang memperkuat dan mengurangi dampak infrastruktur jalan dan pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan public (Sutisna et. al, 2024) sehingga memerlukan analisis yang lebih komprehensif selama periode yang mencakup 2020-2025. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah infrastruktur jalan (X1) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025?

2. Apakah pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025?
3. Apakah jumlah penduduk (Z) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025?
4. Apakah jumlah penduduk (Z) mampu memoderasi pengaruh infrastruktur jalan (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2025.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2025.
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025.
4. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dan dari beberapa rumusan masalah serta beberapa tujuan diatas maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara infrastruktur jalan, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pembangunan daerah yang menempatkan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi, karena jumlah penduduk dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup, menjadi referensi bagi akademisi di bidang ekonomi pembangunan, serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang sejenis.

1.5 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif Provinsi Jawa Barat secara agregat (tingkat provinsi), tanpa membedakan analisis per kabupaten/kota.
2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data indikator ekonomi makro dan pembangunan yang berkaitan dengan Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2025.

3. Penelitian ini hanya berfokus pada pengujian hubungan langsung dan interaksi (moderasi) antara variabel infrastruktur jalan, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis ekonometrika berbasis data panel